



Salah satu rumah penerima manfaat program bedah rumah di Kelurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Minggu (7/6).

HUT KE-79 PEMKOT JOGJA

Bedah 30 Rumah Tanpa APBD dan APBN

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menunjukkan langkah nyata dalam membantu masyarakat dengan membedah 30 rumah tidak layak huni (RTLH) hanya dalam waktu satu bulan. Menariknya, program ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (APBN), melainkan sepenuhnya mengandalkan gotong royong warga dan dukungan *corporate social responsibility* (CSR).

Program ini digulirkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 Pemkot Jogja dan langsung memberikan dampak signifikan. Bahkan dalam waktu sepekan sejak digerakkan, sudah ada kontribusi untuk pembenahan 22 rumah dari partisipasi masyarakat dan kalangan pengusaha.

► Halaman 10

Bedah 30 Rumah...

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyebut capaian tersebut sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata. "Baru seminggu digerakkan, sudah ada 22 rumah yang dibantu. Ini luar biasa. Total 30 rumah bisa selesai dalam sebulan tanpa APBD dan APBN," ujarnya saat penyerahan program di Kelurahan Ngampilan, Minggu (7/6).

Sejak awal Januari-31 Mei 2026, terdapat 27 rumah yang dibedah. Ditambah pekerjaan dalam sepekan pada Juni 2026 sebanyak 22 rumah, total 49 rumah yang dibedah hingga saat ini. Sedangkan tahun sebelumnya pada 2025, total 68 kegiatan bedah rumah. Total anggaran pada 2025 untuk kegiatan ini Rp1,33 miliar, dan di 2026 telah menelan biaya Rp575 juta, yang berasal dari berbagai pihak.

Menurut Hasto, momentum hari jadi pemerintah daerah seharusnya diisi dengan kegiatan yang berdampak langsung, bukan sekadar seremoni. Program bedah rumah dipilih karena mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, terutama mereka yang tinggal di hunian dengan kondisi memprihatinkan.

Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang hidup di rumah dengan kondisi tidak sehat dan berisiko. Bahkan, ada rumah yang dinilai lebih aman ditinggalkan

dibanding ditempati.

Inovasi juga dilakukan dalam program ini dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan bangunan. Material seperti genteng dan sebagian dinding dibuat dari olahan limbah plastik, termasuk tutup botol dan kemasan *sachet* yang diolah menjadi *ecobrick*.

Di tingkat kelurahan, peran Tuwaggana menjadi kunci keberhasilan program. Mereka bertugas mengidentifikasi rumah tidak layak huni berdasarkan kondisi fisik dan ekonomi warga, kemudian mengusulkannya untuk mendapatkan bantuan.

Perwakilan Tuwaggana Ngampilan, Edy Haryono, menjelaskan bahwa proses di lapangan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat, termasuk pengelolaan dana CSR hingga pelaksanaan pembangunan.

Salah satu penerima manfaat, Sri Ponowati, mengaku sangat terbantu dengan program ini. Sebelumnya, kondisi rumahnya nyaris roboh dengan atap rusak dan dinding lapuk. Kini, rumah tersebut telah berubah menjadi hunian yang layak dan nyaman. Program ini menjadi contoh nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta mampu menghadirkan perubahan cepat dan berdampak langsung, sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat Jogja: (Ariq Fajar Hidayat/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005